



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2965 K/80/MEM/2011**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN
DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI,
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2012**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2012 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
13. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Konsultasi Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, MINYAK BUMI, DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2012.

KESATU : Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2012 untuk masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut :

- a. Sub sektor pertambangan umum tahun 2012 sejumlah 1 (satu) Provinsi, 251 (dua ratus lima puluh satu) Kabupaten dan 19 (sembilan belas) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- b. Sub sektor pertambangan panas bumi tahun 2012 sejumlah 4 (empat) Kabupaten dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- c. Sub sektor pertambangan minyak bumi tahun 2012 sejumlah 6 (enam) Provinsi, 56 (lima puluh enam) Kabupaten dan 5 (lima) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.
- d. Sub sektor pertambangan gas bumi tahun 2012 sejumlah 5 (lima) Provinsi, 40 (empat puluh) Kabupaten dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...

KEDUA : Dasar penghitungan bagian daerah penghasil adalah sebagai berikut :

a. Sumber daya alam sub sektor pertambangan umum adalah :

1. prakiraan penerimaan dari luran Tetap/*Landrent* yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan);
2. prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty atau luran Produksi dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual.

b. Sumber daya alam sub sektor minyak bumi dan gas bumi :

Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah *lifting* minyak bumi dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu PT Pertamina EP, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan/atau Kontrak Kerja Sama lainnya di daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Penetapan daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Sub sektor pertambangan umum :

1. daerah penghasil luran Tetap (*Landrent*) adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara;
2. daerah penghasil luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty atau luran Produksi adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

b. Sub sektor pertambangan panas bumi :

Daerah penghasil sub sektor Pertambangan Panas Bumi berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi sebagai berikut :

No.	Parameter	Bobot Penilaian
1.	Area kontrak/prospek	20 %
2.	Infrastruktur produksi :	30 %
	a. Sumur produksi (10%)	
	b. Sumur injeksi (5 %)	
	c. Jaringan pipa (5%)	
	d. Pembangkit (10%)	
3.	Infrastruktur penunjang :	20 %
	a. Infrastruktur bangunan (10%)	
	b. Infrastruktur jalan (10%)	
4.	Realisasi produksi	30 %
	Total	100 %

c. Sub sektor minyak bumi dan gas bumi :

1. daerah penghasil untuk wilayah kerja pertambangan di daratan (*onshore*) adalah Kabupaten/Kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara;

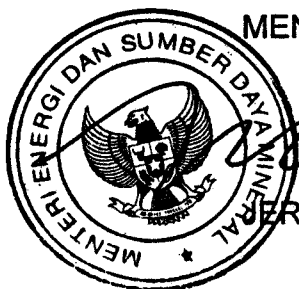
2. daerah ...

2. daerah penghasil untuk wilayah kerja pertambangan di lepas pantai (*offshore*) adalah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



[Handwritten Signature]
ZERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
8. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
9. Para gubernur yang bersangkutan
10. Para bupati/walikota yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2965 K/80/MEM/2011
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2011

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL
 SUB SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2012

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Nanggroe Aceh Darusallam		2.011.600.000	1.029.382.000	3.040.882.000
1	Kab. Aceh Selatan	IUP	1.818.000.000	283.900.000	2.101.900.000
2	Kab. Aceh Barat	IUP, KK	45.000.000	284.891.200	329.891.200
3	Kab. Gayo Lues	IUP	-	250.000.000	250.000.000
4	Kab. Aceh Besar	IUP	90.000.000	38.700.000	128.700.000
5	Kab. Pidie	IUP, KK	-	52.826.000	52.826.000
6	Kota Subulussalam	IUP	36.000.000	12.000.000	48.000.000
7	Kab. Aceh Timur	IUP	22.500.000	12.000.000	34.500.000
8	Kab. Nagan Raya	IUP	-	30.000.000	30.000.000
9	Kab. Aceh Singkil	KK	-	16.864.800	16.864.800
10	Kab. Aceh Barat Daya	IUP	-	16.000.000	16.000.000
11	Kab. Aceh Tengah	IUP	-	12.000.000	12.000.000
12	Kab. Aceh Tamiang	IUP	-	10.400.000	10.400.000
13	Kab. Aceh Jaya	IUP	-	6.000.000	6.000.000
14	Kab. Pidie Jaya	IUP	-	2.000.000	2.000.000
15	Kab. Bireun	IUP	-	2.000.000	2.000.000
II	Sumatera Utara		-	2.931.203.600	2.931.203.600
1	Kab. Mandailing Natal	IUP, KK	-	878.485.200	878.485.200
2	Kab. Tapanuli Utara	KK, IUP	-	573.916.000	573.916.000
3	Kota Padang Sidempuan	KK	-	506.230.000	506.230.000
4	Kab. Tapanuli Selatan	KK	-	494.040.000	494.040.000
5	Kab. Tapanuli Tengah	KK, IUP	-	275.220.000	275.220.000
6	Kab. Dairi	IUP, KK	-	130.980.000	130.980.000
7	Kab. Toba Samosir	IUP	-	37.500.000	37.500.000
8	Kab. Pakpak Bharat	IUP, KK	-	16.480.400	16.480.400
9	Kab. Karo	IUP	-	16.352.000	16.352.000
10	Kab. Humbang Hasundutan	IUP	-	2.000.000	2.000.000
III	Sumatera Barat		33.335.000.000	616.400.750	33.951.400.750
1	Kota Sawahlunto	IUP	16.720.000.000	135.596.500	16.855.596.500
2	Kab. Dharmasraya	IUP	12.400.000.000	70.775.000	12.470.775.000
3	Kab. Solok Selatan	IUP	1.440.000.000	89.000.000	1.529.000.000
4	Kab. Sijunjung	IUP	1.260.000.000	32.488.250	1.292.488.250
5	Kab. Lima Puluh Kota	IUP	780.000.000	26.702.000	806.702.000
6	Kab. Solok	IUP	735.000.000	70.980.000	805.980.000
7	Kab. Pesisir Selatan	IUP	-	82.500.000	82.500.000
8	Kab. Pasaman	IUP	-	74.230.000	74.230.000
9	Kab. Pasaman Barat	IUP	-	20.505.000	20.505.000
10	Kab. Agam	IUP	-	9.014.000	9.014.000
11	Kab. Tanah Datar	IUP	-	4.610.000	4.610.000
IV	Riau		54.891.000.000	2.125.771.000	57.016.771.000
1	Kab. Indragiri Hulu	IUP, PKP2B	48.845.000.000	1.575.951.500	50.220.951.500
2	Kab. Indragiri Hilir	IUP, PKP2B	3.750.000.000	242.579.000	3.992.579.000
3	Kab. Kuantan Singingi	IUP, PKP2B	2.340.000.000	152.223.000	2.492.223.000
4	Kab. Rokan Hulu	IUP	90.000.000	25.000.000	115.000.000
5	Kab. Kampar	IUP	54.000.000	40.025.000	94.025.000
6	Kab. Siak	IUP	12.000.000	25.025.000	37.025.000
7	Kab. Pelalawan	IUP, PKP2B	-	32.950.000	32.950.000
8	Kab. Meranti	IUP	-	32.017.500	32.017.500

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
V	Kepulauan Riau		101.357.000.000	1.050.404.600	102.407.404.600
1	Kab. Bintan	IUP	34.155.000.000	81.433.000	34.236.433.000
2	Kab. Karimun	IUP, KK	26.084.000.000	614.888.600	26.698.888.600
3	Kota Tanjung Pinang	IUP	26.084.000.000	65.280.000	26.149.280.000
4	Kab. Lingga	IUP	6.634.000.000	92.350.000	6.726.350.000
5	Pemprov Kepulauan Riau	IUP	8.400.000.000	196.453.000	8.596.453.000
VI	Jambi		77.585.000.000	3.667.361.900	81.252.361.900
1	Kab. Bungo	IUP, PKP2B	56.160.000.000	227.433.800	56.387.433.800
2	Kab. Batang Hari	IUP, PKP2B	8.000.000.000	767.110.500	8.767.110.500
3	Kab. Sarolangun	IUP, PKP2B	5.600.000.000	1.543.644.600	7.143.644.600
4	Kab. Merangin	IUP	4.500.000.000	143.955.000	4.643.955.000
5	Kab. Tebo	IUP	2.200.000.000	456.343.000	2.656.343.000
6	Kab. Muaro Jambi	IUP	900.000.000	355.100.000	1.255.100.000
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	IUP	225.000.000	173.775.000	398.775.000
VII	Sumatera Selatan		508.262.000.000	13.641.196.400	521.903.196.400
1	Kab. Muara Enim	IUP, PKP2B	305.250.000.000	5.863.055.200	311.113.055.200
2	Kab. Lahat	IUP, PKP2B	172.430.000.000	439.294.600	172.869.294.600
3	Kab. Musi Banyuasin	IUP, PKP2B	29.707.000.000	2.078.070.300	31.785.070.300
4	Kab. Banyuasin	IUP, PKP2B	-	2.733.997.000	2.733.997.000
5	Kab. Ogan Komering Ulu	IUP, PKP2B	875.000.000	540.461.500	1.415.461.500
6	Kab. Musi Rawas	IUP, KK, PKP2B	-	724.556.800	724.556.800
7	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	IUP	-	316.178.500	316.178.500
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	IUP, PKP2B	-	269.520.000	269.520.000
9	Kab. Ogan Ilir	IUP	-	256.600.000	256.600.000
10	Kab. Ogan Komering Ilir	IUP	-	244.644.500	244.644.500
11	Kota Prabumulih	IUP	-	170.818.000	170.818.000
12	Kab. Empat Lawang	IUP	-	4.000.000	4.000.000
VIII	Kep. Bangka Belitung		400.750.000.000	14.820.080.440	415.570.080.440
1	Kab. Bangka Induk	IUP	111.000.000.000	5.828.519.000	116.828.519.000
2	Kab. Bangka Selatan	IUP, KK	87.333.333.333	2.666.952.800	90.000.286.133
3	Kab. Bangka Tengah	IUP, KK	74.166.666.667	1.861.333.140	76.027.999.807
4	Kab. Bangka Barat	IUP	57.000.000.000	2.178.712.500	59.178.712.500
5	Kab. Belitung Timur	IUP	37.500.000.000	1.668.788.000	39.168.788.000
6	Kab. Belitung Induk	IUP	33.750.000.000	495.825.000	34.245.825.000
7	Kota Pangkal Pinang	IUP	-	119.950.000	119.950.000
IX	Bengkulu		48.840.000.000	975.096.200	49.815.096.200
1	Kab. Bengkulu Tengah	IUP	27.200.000.000	49.886.700	27.249.886.700
2	Kab. Bengkulu Utara	IUP	20.600.000.000	545.437.000	21.145.437.000
3	Kab. Seluma	IUP	450.000.000	36.075.250	486.075.250
4	Kab. Kaur	SIPP	270.000.000	13.759.750	283.759.750
5	Kab. Lebong	IUP	-	219.715.000	219.715.000
6	Kab. Bengkulu Selatan	SIPP	120.000.000	78.750.000	198.750.000
7	Kab. Mukomuko	IUP	-	18.472.500	18.472.500
8	Kab. Kepahiang	IUP	-	13.000.000	13.000.000
X	Lampung		9.327.500.000	821.302.300	10.148.802.300
1	Kab. Tanggamus	IUP, KK	9.245.000.000	486.692.800	9.731.692.800
2	Kab. Lampung Tengah	IUP	52.500.000	63.695.000	116.195.000
3	Kab. Pesawaran	IUP	30.000.000	71.916.000	101.916.000
4	Kab. Way Kanan	IUP, PKP2B	-	75.140.000	75.140.000
5	Kab. Mesuji	IUP	-	60.000.000	60.000.000
6	Kab. Lampung Barat	KK	-	43.396.000	43.396.000
7	Kab. Tulang Bawang	IUP	-	20.462.500	20.462.500

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XI	Jawa Barat		37.155.185.000	875.294.725	38.030.479.725
1	Kab. Bogor	IUP	34.544.185.000	192.326.725	34.736.511.725
2	Kab. Tasikmalaya	IUP	2.500.000.000	8.500.000	2.508.500.000
3	Kab. Sukabumi	IUP	56.000.000	371.068.000	427.068.000
4	Kab. Garut	IUP	30.000.000	141.750.000	171.750.000
5	Kab. Cianjur	IUP	25.000.000	75.000.000	100.000.000
6	Kab. Purwakarta	IUP	-	77.450.000	77.450.000
7	Kab. Ciamis		-	9.200.000	9.200.000
XII	Banten		9.844.612.500	217.648.000	10.062.260.500
1	Kab. Pandeglang	IUP	9.604.500.000	33.500.000	9.638.000.000
2	Kab. Lebak	IUP	240.112.500	184.148.000	424.260.500
XIII	Jawa Tengah		3.242.500.000	172.459.000	3.414.959.000
1	Kab. Cilacap	IUP	3.015.000.000	18.304.000	3.033.304.000
2	Kab. Wonogiri	IUP	227.500.000	101.400.000	328.900.000
3	Kab. Banyumas		-	22.985.000	22.985.000
4	Kab. Pekalongan	IUP	-	14.045.000	14.045.000
5	Kab. Banjarnegara		-	12.370.000	12.370.000
6	Kab. Kebumen		-	3.355.000	3.355.000
XIV	Daerah Istimewa Yogyakarta		-	13.665.000	13.665.000
1	Kab. Kulonprogo	IUP	-	13.665.000	13.665.000
XV	Jawa Timur		1.380.130.000	343.338.000	1.723.468.000
1	Kab. Banyuwangi	IUP	227.500.000	250.968.000	478.468.000
2	Kab. Jombang	IUP	378.000.000	25.750.000	403.750.000
3	Kab. Lumajang	IUP	213.750.000	17.500.000	231.250.000
4	Kab. Pasuruan	IUP	183.750.000	9.250.000	193.000.000
5	Kab. Jember	IUP	153.000.000	10.078.000	163.078.000
6	Kab. Trenggalek	IUP	63.750.000	8.000.000	71.750.000
7	Kab. Pachtan	IUP	58.800.000	10.500.000	69.300.000
8	Kab. Blitar	IUP	60.000.000	2.292.000	62.292.000
9	Kota Mojokerto		22.680.000	-	22.680.000
10	Kab. Mojokerto	IUP	18.900.000	-	18.900.000
11	Kab. Madiun	IUP	-	5.000.000	5.000.000
12	Kab. Ponorogo	IUP	-	4.000.000	4.000.000
XVI	Kalimantan Barat		65.019.927.000	12.310.037.815	77.329.964.815
1	Kab. Ketapang	IUP	53.812.500.000	8.085.672.915	61.898.172.915
2	Kab. Kapuas Hulu	IUP	6.250.000.000	547.124.000	6.797.124.000
3	Kab. Sanggau	IUP	3.750.000.000	1.206.673.500	4.956.673.500
4	Kab. Bengkayang	IUP	480.224.500	380.387.500	860.612.000
5	Kab. Landak	IUP	270.000.000	545.698.000	815.698.000
6	Kab. Sambas	IUP	432.202.500	342.217.500	774.420.000
7	Kab. Kubu Raya	IUP	-	419.325.000	419.325.000
8	Kab. Kayong Utara	IUP	-	368.020.000	368.020.000
9	Kab. Pontianak	IUP	-	191.450.000	191.450.000
10	Kab. Sintang	IUP, KK, PKP2B	-	170.925.400	170.925.400
11	Kab. Sekadau	IUP	25.000.000	11.410.000	36.410.000
12	Kab. Melawi	IUP	-	34.065.000	34.065.000
13	Kota Singkawang	IUP	-	7.069.000	7.069.000
XVII	Kalimantan Tengah		394.468.750.000	13.692.468.290	408.161.218.290
1	Kab. Murung Raya	IUP, KK, PKP2B	268.718.000.000	3.794.357.800	272.512.357.800
2	Kab. Kapuas	IUP, KK, PKP2B	50.000.000.000	1.222.291.100	51.222.291.100
3	Kab. Barito Utara	IUP, PKP2B	28.952.000.000	3.770.465.740	32.722.465.740
4	Kab. Barito Selatan	IUP, PKP2B	23.225.000.000	1.375.677.800	24.600.677.800
5	Kab. Barito Timur	IUP, PKP2B	16.250.000.000	1.186.800.000	17.436.800.000
6	Kab. Lamandau	IUP	4.218.750.000	100.780.000	4.319.530.000
7	Kota Palangka Raya	IUP	1.800.000.000	36.147.000	1.836.147.000
8	Kab. Gunung Mas	IUP, KK	90.000.000	1.417.553.400	1.507.553.400
9	Kab. Katingan	IUP, KK	900.000.000	399.806.750	1.299.806.750
10	Kab. Kotawaringin Timur	IUP	225.000.000	153.847.000	378.847.000
11	Kab. Kotawaringin Barat	IUP, KK	90.000.000	39.763.600	129.763.600
12	Kab. Seruyan	IUP, KK	-	108.665.600	108.665.600
13	Kab. Sukamara	IUP	-	82.500.000	82.500.000
14	Kab. Pulang Pisau	IUP	-	3.812.500	3.812.500

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XVIII	Kalimantan Selatan		2.749.699.680.000	11.568.837.800	2.761.268.517.800
1	Kab. Balangan	IUP, PKP2B	576.576.000.000	697.704.000	577.273.704.000
2	Kab. Tabalong	IUP, PKP2B	510.224.000.000	868.941.800	511.092.941.800
3	Kab. Tanah Bumbu	IUP, KK, PKP2B	458.712.000.000	2.869.224.600	461.581.224.600
4	Kab. Tanah Laut	IUP, KK, PKP2B	438.020.000.000	1.668.460.800	439.708.460.800
5	Kab. Kotabaru	IUP, KK, PKP2B	305.585.600.000	3.123.927.000	308.709.527.000
6	Kab. Banjar	IUP, KK, PKP2B	250.546.880.000	869.708.000	251.416.588.000
7	Kab. Tapin	IUP, PKP2B	180.962.200.000	674.432.400	181.636.632.400
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	IUP, PKP2B	29.073.000.000	413.144.000	29.486.144.000
9	Kota Banjarbaru	KK, PIUP2B	-	229.917.600	229.917.600
10	Kab. Hulu Sungai Tengah	IUP, PKP2B	-	118.377.600	118.377.600
11	Kab. Barito Kuala	IUP	-	15.000.000	15.000.000
XIX	Kalimantan Timur		8.287.526.537.500	46.217.854.450	8.333.744.391.950
1	Kab. Kutai Timur	IUP, PKP2B	3.904.424.000.000	11.348.785.000	3.915.772.785.000
2	Kab. Kutai Kartanegara	IUP, PKP2B	1.745.178.537.500	15.403.850.600	1.760.582.388.100
3	Kab. Berau	IUP, PKP2B	850.620.000.000	2.144.358.950	852.764.358.950
4	Kab. Kutai Barat	IUP, KK, PKP2B	767.420.000.000	11.095.709.600	778.515.709.600
5	Kab. Paser	IUP, PKP2B	647.420.000.000	1.381.388.200	648.801.388.200
6	Kab. Nunukan	IUP, PKP2B	167.984.000.000	693.793.400	168.677.793.400
7	Kota Samarinda	IUP, PKP2B	122.200.000.000	605.746.100	122.805.746.100
8	Kab. Malinau	IUP	40.500.000.000	420.350.000	40.920.350.000
9	Kab. Bulungan	IUP, PKP2B	29.280.000.000	2.208.428.400	31.488.428.400
10	Kab. Penajam Paser Utara	IUP	7.500.000.000	475.438.000	7.975.438.000
11	Kab. Tana Tidung	IUP, PKP2B	5.000.000.000	356.199.800	5.356.199.800
12	Kota Tarakan	IUP	-	62.000.000	62.000.000
13	Kota Bontang	PIUP2B	-	21.806.400	21.806.400
XX	Nusa Tenggara Barat		148.000.000.000	4.161.506.000	152.161.506.000
1	Kab. Sumbawa Barat	IUP, KK	148.000.000.000	1.622.511.000	149.622.511.000
2	Kab. Sumbawa	IUP, KK	-	1.853.793.000	1.853.793.000
3	Kab. Bima	IUP, KK	-	509.092.000	509.092.000
4	Kab. Lombok Barat	IUP	-	99.688.000	99.688.000
5	Kab. Dompu	IUP, KK	-	67.161.000	67.161.000
6	Kab. Lombok Tengah	IUP	-	9.261.000	9.261.000
XXI	Nusa Tenggara Timur		1.404.000.000	941.559.000	2.345.559.000
1	Kab. Timor Tengah Utara	IUP	975.000.000	9.200.000	984.200.000
2	Kab. Belu	IUP	292.500.000	396.336.000	688.836.000
3	Kab. Manggarai Timur	IUP	39.000.000	125.113.000	164.113.000
4	Kab. Manggarai Barat	IUP	19.500.000	143.870.000	163.370.000
5	Kab. Manggarai	IUP	39.000.000	57.225.000	96.225.000
6	Kab. Rote Ndao	IUP	-	79.026.000	79.026.000
7	Kab. Ende	IUP	-	66.610.000	66.610.000
8	Kab. Timor Tengah Selatan	IUP	19.500.000	37.600.000	57.100.000
9	Kab. Kupang	IUP	19.500.000	18.579.000	38.079.000
10	Kab. Alor	IUP	-	8.000.000	8.000.000
XXII	Sulawesi Utara		4.200.000.000	1.964.810.760	6.164.810.760
1	Kab. Bolaang Mongondow Timur	IUP, KK	4.200.000.000	1.646.690.000	5.846.690.000
2	Kab. Minahasa Utara	IUP, KK	-	131.531.600	131.531.600
3	Kab. Minahasa Tenggara	KK	-	44.995.000	44.995.000
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	IUP, KK	-	39.218.600	39.218.600
5	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	IUP	-	34.000.000	34.000.000
6	Kab. Bolaang Mongondow	IUP, KK	-	33.680.000	33.680.000
7	Kab. Minahasa Selatan	IUP, KK	-	22.475.200	22.475.200
8	Kota Bitung	KK	-	11.808.200	11.808.200
9	Kota Manado	KK	-	412.160	412.160
XXIII	Gorontalo		180.000.000	454.310.400	634.310.400
1	Kab. Pohuwato	KK, IUP	180.000.000	199.380.400	379.380.400
2	Kab. Bone Bolango	IUP, KK	-	149.145.400	149.145.400
3	Kab. Gorontalo	IUP, KK	-	65.934.600	65.934.600
4	Kab. Gorontalo Utara	IUP	-	29.850.000	29.850.000
5	Kab. Boalemo	IUP	-	10.000.000	10.000.000

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XXIV	Sulawesi Tengah		28.822.453.000	4.379.865.080	33.202.318.080
1	Kab. Morowali	IUP, KK	28.393.625.000	1.463.876.200	29.857.501.200
2	Kab. Banggai	IUP	428.828.000	508.215.000	937.043.000
3	Kab. Toli-Toli	IUP, KK	-	774.673.480	774.673.480
4	Kab. Donggala	IUP, KK	-	577.243.000	577.243.000
5	Kab. Buol	IUP, KK	-	318.558.200	318.558.200
6	Kab. Parigi Moutong	IUP, KK	-	275.610.800	275.610.800
7	Kab. Poso	IUP	-	185.330.000	185.330.000
8	Kab. Tojo Una-Una	IUP	-	134.924.000	134.924.000
9	Kota Palu	KK	-	81.323.800	81.323.800
10	Kab. Sigi	IUP, KK	-	60.110.800	60.110.800
XXV	Sulawesi Selatan		75.250.000.000	3.048.970.940	78.298.970.940
1	Kab. Luwu Timur	IUP, KK	75.000.000.000	1.610.600.320	76.610.600.320
2	Kab. Luwu	IUP, KK	-	591.332.640	591.332.640
3	Kab. Luwu Utara	IUP, KK	-	333.416.000	333.416.000
4	Kab. Toraja Utara	IUP	250.000.000	16.475.000	266.475.000
5	Kab. Sidenreng Rappang	KK	-	122.406.000	122.406.000
6	Kab. Tana Toraja	IUP	-	99.000.000	99.000.000
7	Kab. Maros	IUP	-	61.265.000	61.265.000
8	Kota Palopo	IUP	-	54.408.000	54.408.000
9	Kab. Enrekang	IUP, KK	-	45.249.200	45.249.200
10	Kab. Barru	IUP	-	33.000.000	33.000.000
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	IUP	-	21.800.000	21.800.000
12	Kab. Bone	IUP	-	16.747.000	16.747.000
13	Kab. Takalar	IUP	-	15.355.580	15.355.580
14	Kab. Sinjai	IUP	-	13.969.000	13.969.000
15	Kab. Wajo	KK	-	8.565.200	8.565.200
16	Kab. Jeneponto	IUP	-	5.382.000	5.382.000
XXVI	Sulawesi Barat		-	115.500.000	115.500.000
1	Kab. Mamuju	IUP	-	90.000.000	90.000.000
2	Kab. Mamasa	IUP	-	15.500.000	15.500.000
3	Kab. Mamuju Utara	IUP	-	10.000.000	10.000.000
XXVII	Sulawesi Tenggara		87.027.483.000	5.635.895.300	92.663.378.300
1	Kab. Kolaka	IUP, KK	32.162.115.000,00	717.989.800	32.880.104.800
2	Kab. Konawe Utara	IUP	14.294.273.000,00	1.182.980.700	15.477.253.700
3	Kab. Bombana	IUP, KK	14.550.991.000,00	779.934.200	15.330.925.200
4	Kab. Konawe Selatan	IUP, KK	12.864.846.000,00	362.186.600	13.227.032.600
5	Kab. Kolaka Utara	IUP, KK	8.576.564.000,00	424.561.200	9.001.125.200
6	Kab. Buton	IUP	2.858.854.000,00	394.207.500	3.253.061.500
7	Kab. Konawe	IUP, KK	1.286.484.000,00	1.586.094.300	2.872.578.300
8	Kab. Buton Utara	IUP	357.356.000,00	78.941.000	434.297.000
9	Kota Bau-Bau	IUP	76.000.000,00	105.000.000	181.000.000
10	Kab. Muna	IUP	-	6.000.000	6.000.000
XXVIII	Maluku		67.200.000.000	452.576.000	67.652.576.000
1	Kab. Maluku Barat Daya	IUP	67.200.000.000	168.750.000	67.368.750.000
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	IUP	-	158.823.500	158.823.500
3	Kab. Seram Bagian Barat	IUP	-	81.270.000	81.270.000
4	Kab. Maluku Tengah	IUP	-	43.732.500	43.732.500
XXIX	Maluku Utara		141.342.113.000	3.870.099.850	145.212.212.850
1	Kab. Halmahera Timur	IUP	79.824.439.000	860.782.500	80.685.221.500
2	Kab. Halmahera Utara	IUP, KK	32.071.471.000	951.079.200	33.022.550.200
3	Kab. Halmahera Selatan	IUP	28.588.547.000	556.010.000	29.144.557.000
4	Kab. Kepulauan Sula	IUP	-	1.113.493.250	1.113.493.250
5	Kab. Halmahera Tengah	IUP, KK	857.856.000	172.569.900	1.030.225.900
6	Kab. Halmahera Barat	IUP	-	124.680.000	124.680.000
7	Kab. Morotai	IUP	-	59.485.000	59.485.000
8	Kota Tidore Kepulauan	IUP	-	32.000.000	32.000.000

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XXX	Papua		950.000.000.000	5.527.998.900	955.527.998.900
1	Kab. Mimika	IUP, KK	950.000.000.000	1.177.802.200	951.177.802.200
2	Kab. Paniai	IUP, KK	-	1.185.460.000	1.185.460.000
3	Kab. Sarmi	IUP, KK	-	954.170.400	954.170.400
4	Kab. Nabire	IUP, KK	-	525.449.000	525.449.000
5	Kab. Keerom	IUP, KK	-	375.410.000	375.410.000
6	Kab. Puncak Jaya	KK	-	272.995.200	272.995.200
7	Kab. Tolikara	KK	-	283.239.600	283.239.600
8	Kab. Waropen	IUP, KK	-	165.606.000	165.606.000
9	Kab. Jayapura	IUP	-	146.565.000	146.565.000
10	Kab. Pegunungan Bintang	KK	-	139.150.000	139.150.000
11	Kab. Jayawijaya	IUP, KK	-	101.526.500	101.526.500
12	Kab. Mamberamo Raya	IUP	-	100.000.000	100.000.000
13	Kab. Kepulauan Yapen	IUP	-	74.955.000	74.955.000
14	Kab. Yahukimo	IUP	-	45.670.000	45.670.000
XXXI	Papua Barat		7.127.718.000	1.253.836.500	8.381.554.500
1	Kab. Raja Ampat	IUP, KK	7.027.718.000	236.550.600	7.264.268.600
2	Kab. Kaimana	KK	-	496.634.400	496.634.400
3	Kab. Sorong Selatan	IUP	-	209.412.000	209.412.000
4	Kab. Teluk Bintuni	IUP	100.000.000	109.188.000	209.188.000
5	Kab. Sorong	IUP	-	99.040.500	99.040.500
6	Kab. Manokwari	IUP	-	66.636.000	66.636.000
7	Kab. Fakfak	IUP	-	36.375.000	36.375.000
	Jumlah		14.295.050.089.000	158.896.731.000	14.453.946.820.000




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

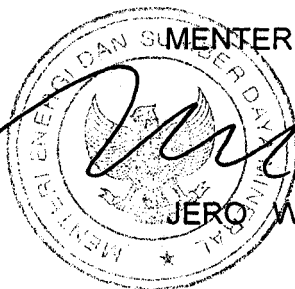
ERRO WACIK

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2965 K/80/MEM/2011
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2011

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN
DAERAH PENGHASIL SUB SEKTOR PERTAMBANGAN PANAS BUMI
UNTUK TAHUN 2012

No.	Area / Kabupaten	Pengembang	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
I.	Gunung Salak	Chevron Geothermal Salak, Ltd	
1	Kabupaten Sukabumi		45.21
2	Kabupaten Bogor		54.79
II.	Darajat	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	
1	Kabupaten Garut		89.70
2	Kabupaten Bandung		10.30
III.	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy	
1	Kabupaten Bandung		87.06
2	Kabupaten Garut		12.94

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

JERO WACIK



LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2965 K/80/MEM/2011

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2011

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUB SEKTOR MINYAK BUMI
UNTUK TAHUN 2012

NO.	WILAYAH/PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (RIBU BAREL)
A.	0 - 4 MIL LAUT		290.129,67
I.	Nanggroe Aceh Darussalam		2.000,85
		1. Kab. Aceh Timur	80,93
		2. Kab. Aceh Utara	681,52
		3. Kab. Aceh Tamiang	1.238,40
II.	Sumatera Utara		284,78
		4. Kab. Langkat	256,59
		5. Kab. Binjai	27,89
		6. Kab. Deli Serdang	0,30
III.	Riau		142.929,67
		7. Kab. Bengkalis	77.089,39
		8. Kab. Indragiri Hulu	737,52
		9. Kab. Kampar	14.207,58
		10. Kab. Rokan Hulu	1.731,98
		11. Kab. Rokan Hilir	20.611,95
		12. Kab. Siak	25.725,78
		13. Kab. Palalawan	508,80
		14. Kab. Kep. Meranti	2.316,67
IV	Kepulauan Riau		19.053,72
		15. Kab. Natuna	12.384,92
		16. Kab. Kep. Anambas	6.668,80
V.	Jambi		10.140,12
		17. Kab. Batang Hari	305,10
		18. Kab. Muaro Jambi	1.156,56
		19. Kota Jambi	596,64
		20. Kab. Tanjung Jabung Timur	1.566,32
		21. Kab. Tanjung Jabung Barat	4.765,48
		22. Kab. Sarolangun	1.527,86
		23. Kab. Tebo	222,16
VI.	Sumatera Selatan		29.389,48
		24. Kab. Lahat	629,78
		25. Kab. Muara Enim	7.854,47
		26. Kota Prabumulih	646,88
		27. Kab. Musi Banyuasin	12.468,78
		28. Kab. Banyuasin	1.440,96
		29. Kab. Musi Rawas	3.586,54
		30. Kab. Ogan Ilir	594,21
		31. Kab. Ogan Komering Ulu	2.167,86
VII.	Lampung		2.724,22
		32. Kab. Lampung Timur	2.724,22
VIII.	DKI Jakarta		2.388,23
		33. DKI Jakarta	2.388,23
IX.	Jawa-Barat		6.478,55
		34. Kab. Indramayu	1.424,77
		35. Kab. Karawang	1.050,25
		36. Kab. Majalengka	31,19
		37. Kab. Subang	131,83
		38. Kab. Bekasi	3.840,51

NO.	WILAYAH/PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (RIBU BAREL)
X.	Jawa-Tengah	39. Kab. Blora	258,06 258,06
XI.	Jawa-Timur	40. Kab. Bojonegoro 41. Kab. Bangkalan 42. Kab. Sumenep 43. Kab. Tuban 44. Kab. Gresik	31.231,09 24.296,41 1.788,21 456,26 714,41 3.975,80
XII.	Kalimantan-Selatan	45. Kab. Tabalong 46. Kab. Balangan	1.781,65 1.615,57 166,08
XIII.	Kalimantan-Timur	47. Kab. Bulungan 48. Kab. Nunukan 49. Kota Tarakan 50. Kota Samarinda 51. Kab. Kutai Kertanegara 52. Kab. Kutai Timur 53. Kab. Panajam Paser Utara 54. Kota Bontang 55. Kab. Tanah Tidung	32.509,84 1.593,07 661,09 1.708,87 211,74 25.483,35 550,09 1.265,38 1.023,57 12,68
XIV.	Sulawesi Tengah	56. Kab. Morowali	1.741,06
XV.	Sulawesi Selatan	57. Kab. Wajo	232,96
XVI.	Maluku	58. Kab. Seram Bagian Timur	1.091,78
XVII.	Papua Barat	59. Kab. Teluk Bintuni 60. Kab. Sorong 61. Kab. Raja Ampat	5.893,61 2.027,99 3.525,79 339,83
B.	4 - 12 MIL LAUT		37.035,07
I.	Lampung		4.866,32
II.	Bangka Belitung		610,42
III.	Jawa-Barat		5.913,07
IV.	Kalimantan Timur		21.763,44
V.	Kep. Riau		937,69
VI.	Jawa Timur		2.944,13
C.	> 12 MIL LAUT	PEMERINTAH PUSAT	20.535,24



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

JERO WACIK

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2965 K/80/MEM/2011

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2011

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUB SEKTOR GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2012

NO.	WILAYAH/PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (RIBU BAREL)
A.	0 - 4 MIL LAUT		2.159.184,54
I.	Nanggroe Aceh Darussalam	1. Kab. Aceh Timur 2. Kab. Aceh Utara	21.979,89 1.830,00 20.149,89
II.	Sumatera Utara	3. Kab. Langkat 4. Kab. Binjai 5. Kab. Deli Serdang	4.929,05 4.013,63 698,60 216,82
III.	Riau	6. Kota Pekanbaru 7. Kab. Palalawan 8. Kab. Kep. Meranti 9. Kab. Kampar	11.712,00 1.830,00 9.383,83 366,00 132,17
IV	Kepulauan Riau	10. Kab. Natuna 11. Kab. Kep. Anambas	165.066,00 107.292,90 57.773,10
V.	Jambi	12. Kab. Batang Hari 13. Kab. Tanjung Jabung Timur 14. Kab. Tanjung Jabung Barat 15. Kab. Muaro Jambi	54.443,77 1.098,00 19.262,09 33.075,91 1.007,77
VI.	Sumatera Selatan	16. Kab. Lahat 17. Kab. Muara Enim 18. Kota Prabumulih 19. Kab. Musi Banyuasin 20. Kab. Musi Rawas 21. Kab. Ogan Komering Ulu	635.614,97 16.021,77 46.103,03 385,63 392.422,45 176.535,55 4.146,54
VII.	DKI Jakarta	22. DKI Jakarta	12.810,00
VIII.	Jawa-Barat	23. Kab. Indramayu 24. Kab. Karawang 25. Kab. Majalengka 26. Kab. Subang 27. Kab. Bekasi	148.932,44 11.758,26 45.559,16 873,41 72.287,42 18.454,19
IX.	Jawa-Timur	28. Kab. Sumenep 29. Kab. Sidoarjo 30. Kab. Gresik 31. Kab. Bangkalan 32. Kab. Bojonegoro 33. Kab. Tuban	97.902,03 43.546,83 4.758,00 34.744,17 2.075,52 12.590,82 186,69

NO.	WILAYAH/PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (RIBU BAREL)
X.	Jawa Tengah		1.052,75
		34. Kota Semarang	861,63
		35. Kab. Blora	191,12
XI.	Kalimantan Timur		616.415,64
		36. Kota Tarakan	3.111,00
		37. Kota Samarinda	4.464,54
		38. Kab. Kutai Kertanegara	598.208,17
		39. Kab. Panajam Paser Utara	1.585,53
		40. Kota Bontang	5.390,02
		41. Kab. Nunukan	528,44
		42. Kab. Tana Tidung	3.127,94
XII.	Kalimantan Tengah		7.320,00
		43. Kab. Barito Utara	7.320,00
XIII.	Sulawesi Selatan		22.692,00
XIV.	Papua Barat		358.314,00
		45. Kab. Sorong	732,00
		46. Kab. Teluk Bintuni	357.582,00
B.	4 - 12 MIL LAUT		592.275,61
I.	Jawa Barat		43.171,55
II.	Kalimantan Timur		348.915,74
III.	Kep. Riau		87.474,00
IV.	Jawa Timur		99.904,32
V.	Lampung		12.810,00
C.	> 12 MIL LAUT	PEMERINTAH PUSAT	145.429,87



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

[Handwritten Signature]
HERO WACIK